

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R.Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta :Kencana
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta:Sinar Grafika
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Anik Yuesti. 2017.*Perpajakan*. Yogyakarta :ABPublisher
- Azizah. 2016.*Hukum Perseroan Terbatas*,.Malang :Setara Press
- Bambang Sunggono.1997.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Binoto Nadapdap. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*.Jakarta: Permata Aksara
- Chidir Ali.1991.*Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- E.Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1994.*Perusahaan Kelompok(Group Company/Concern)*, Yogyakarta:Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- H.Hadari Namawi.2005. *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta :Gadjah Mada Press
- Kamaruddin Selang.2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- M.Yahya Harahap.2009.*Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mr.N.M.Spelt dan Prof Mr. JB J Ten Berge.1993.*Pengantar Hukum Perijinan*, disunting oleh Philipus M Hadjon.1993. *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya :Yuridika
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Munir Fuady.2005.*Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*.Bandung :CV Utomo
- Mudrajad Kuncoro.2015. *Menulis Skripsi/Tesis dalam 60 Hari*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN
- Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Jakarta:Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2005.*Penelitian Hukum*, Prebada Media
- R.Ali Sido. 1983. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan*. Bandung:Alumni
- Ridwan Khairandy.2009. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurispudensi*, Yogyakarta: Total Media
- Saifudin Anwar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar

- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Syahrani Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni
- Syahrul, et all. 2008. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta : Citra Harta Prima
- Tulus Tambunan, 2009. *Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah, Jurnak Hukum Bisnis*. Volume 26. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1985. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2013, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6215)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pendukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013
- Surat Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jendera Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

### C. Skripsi/Jurnal/Penelitian

- Andi Winda Sari. 2017. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palopo. Skripsi S1 Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Indonesia-Netherlands Association, Indonesia-Benelux Chamber of Commerce*, Peraturan Daerah Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review, 2008 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS.
- Monika Suhayati, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)*
- Putri Wulandari, 2009, *Perizinan Penanaman Modal: Studi di Provinsi DKI Jakarta*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
- Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya
- World Bank, Doing Business 2008, Comparing Regulation in 178 Economies: Indonesia*, 2008

Widowati, 2015, *Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Serta Penyimpangan Jam Kerja*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung

#### D. Internet

Alban Leandri, *NPWP Bagi Wajib Pajak Badan*, <https://www.online-pajak.com/npwp-bagi-wajib-pajak-badan-wpb>

Fitri N Heriani. *Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi*. <https://www.hukumonline.com/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pedoman Perizinan Berusaha Melakui Sistem OSS*, <https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Permudah Perizinan, Perlanjar Investasi*, <https://www.ekon.go.id/berita/view/permudah-perizinan-perlanjar.4032.html>

*NPWP: Mendaftar dengan Online*, <https://www.online-pajak.com/daftar-npwp-online-wajib-pajak-orang-pribadi>

*Online Single Submission, dan Segala Dilemanya*, <https://www.ketapangkab.go.id/2018/07/21/online-single-submission-dan-segala-dilemanya/>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, *Persyaratan SIUP*, <http://pelayanan.jakarta.go.id>,

*Pelayanan Satu Pintu Belum Maksimal, Invstasi Melambat*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1938195/pelayanan-satu-pintu-belum-maksimal-investasi-terhambat>

*PTSP Belum Optimal, Jokowi Tegaskan Semua Izin Harus di BKPM*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160823154235-92-153292/ptsp-belum-optimal-jokowi-tegaskan-semua-izin-harus-di-bkpm>